



DPRD Uuslkan Kenaikan Tarif Transjakarta

Palmerah, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta mengungkap, bahwa tarif angkutan umum Transportasi Jakarta (Transjakarta) belum pernah naik dari era Gubernur Sutiyoso pada 2005 lalu.

Sejak diresmikan pemerintah daerah pada 2004 lalu, tarif Transjakarta mulanya Rp 2.000 per orang, kemudian setahun kemudian naik menjadi Rp 3.500 per orang sampai saat ini.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, pembahasan soal wacana kenaikan tarif ini akan dibahas dengan eksekutif secara intens mulai pekan depan. Nantinya legislatif dan eksekutif akan mempertimbangkan wacana itu untuk kepentingan masyarakat.

"Banyak sekali hal yang perlu kami ulas, pertama salah satu ide awal kenaikan tarif ini karena memang sejak Transjakarta bergulir zaman Gubernur Pak Sutiyoso sampai dengan sekarang, tarifnya belum naik, masih flat," kata Ismail pada Rabu (15/5/2024).

"Sementara kita ketahu bersama segala sesuatunya sudah ada fluktuasi,"

lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga tengah menggalakkan emisi nol atau zero emission akibat polutan gas buang kendaraan.

Saat ini Transjakarta terus memperbanyak armada yang ramah lingkungan dengan tenaga listrik.

"Tentunya nanti berbicara investasi, nah ketika berbicara investasi harus ada penyesuaian. Tujuannya nanti kami yaini untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai pengguna maupun menciptakan lingkungan yang lebih bersih lagi," jelas Ismail.

Diketahui, PT Transjakarta mengungkap adanya usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk menaikkan tarif angkutan umum dari Rp 3.500 menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000.

Bahkan Transjakarta telah melakukan survei lewat media sosial terkait kenaikan tarif saat jam sibuk, dari pukul 07.01-10.00 dan pukul 16.01-21.00.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon

soal survei kenaikan tarif bus Transjakarta. Menurut Heru, pemerintah daerah belum menetapkan kenaikan tarif itu, karena masih dalam pembahasan dengan berbagai pihak.

"Belum (naik), masih dibahas, survei kan boleh saja," imbuh Heru.

Adopsi Semarang

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) disarankan untuk mengadopsi pengenaan tarif angkutan umum yang diterapkan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang selama ini.

Diketahui, Jateng dan Semarang memberikan tarif khusus kepada penumpang tertentu sehingga masyarakat dengan ekonomi lemah tidak terbebani.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, tarif KRL Jabodetabek dan bus Transjakarta memang tidak mengalami penyesuaian sejak lama.

Tarif KRL Jabodetabek yang dikelola PT

KCI terakhir kali melakukan penyesuaian pada 2016 lalu, sedangkan Transjakarta yang dikelola Pemprov DKI dari 2005 silam.

"Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot, Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus," kata Djoko dari keterangannya pada Minggu (5/5/2024).

Djoko mengatakan, tarif Trans Semarang yang dikelola Pemerintah Kota Semarang Rp 4.000 per orang, dan ada tarif khusus Rp 1.000.

Tarif khusus ini diberikan kepada pelajar/mahasiswa, pemegang kartu identitas anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), disabilitas, isian (usia 60 tahun ke atas) dan veteran.

Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemprov Jawa Tengah bertarif Rp 4.000, dan diberikan tarif separuh Rp 2.000 untuk pelajar, mahasiswa dan buruh.

Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, anggaran subsidi atau public service obligation (PSO) perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran

bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran.

Menurutnya, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan, alokasi PSO untuk perkertaapian sebesar Rp 3,5 triliun, sebanyak Rp 1,6 triliun (0,48 persen) diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Sementara di tahun yang sama anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp 177 miliar, 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek, sungguh tidak berimbang.

"Pihak pengelola Transjakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang mau mendapatkan tarif khusus itu. Jika buruh, selain menunjukkan KTP, mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat," ucapnya.

"Jika ketahuan berbohong (mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi), bisa dicabut dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus Transjakarta," lanjutnya. (fa)